

# STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH

*Nona Kumala Sari*

---

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan  
Jln. Sambu No. 64 Medan  
e-mail: [nona27kumalasari@gmail.com](mailto:nona27kumalasari@gmail.com)

---

**Abstract:** School-based education management is an implementation of regional autonomy policy. If the autonomy policy requires the region concerned to administer and manage independently, then so does education. In this case the School which becomes the lowest organizational structure is given the authority to manage and manage their own resources. Implementation of MPBS is expected to trigger equity, and accelerate the improvement of the quality of national education. So that each region can compete to improve the quality of the institution. Of course in the implementation of achievement of success depends on the ability of school leaders in planning, implementing, and oversee all resources owned.

**Keywords:** Strategi, Manajemen, Pendidikan, Sekolah.

## PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, telah terjadi banyak perubahan di segala sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa di Negara ini. Salah satu sendi kehidupan itu ialah pendidikan. Dunia pendidikan mengalami banyak perubahan, salah satu di antara perubahan tersebut adalah mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebelum reformasi cenderung bersifat sentralistik, artinya segala pengelolaan ditentukan oleh pemerintah pusat, mulai dari recruitment SDM, pembiayaan, sampai pada pengawasan juga diatur oleh pusat, sedangkan daerah dalam hal ini hanya melaksanakannya saja.

Namun setelah reformasi, bahkan sampai saat ini pengelolaan pendidikan berubah menjadi desentralistik, maksudnya cenderung pengelolaan menjadi hak dan tanggung jawab daerah masing-masing, bahkan lebih spesifik lagi menjadi hak dan tanggung jawab sekolah. Sebenarnya tujuan ini perluasan dari kebijakan otonomi daerah, yang pada dasarnya menghendaki peningkatan kualitas dan percepatan pencapaian tujuan pembelajaran terhadap sesuatu yang dikelola (dalam hal ini pendidikan).

Menurut Mulyasa (2003: 13) Tujuan dari MPBS adalah meningkatkan efisiensi,

dan pemerataan pendidikan. Peningkatan Efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, Kelenturan penegelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu dakan menjadi tanggung jawab pemerintah .

## PRINSIP DAN ESENSI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH

Dalam upaya memberikan pemahaman terhadap kajian dalam bagian ini, sngat mendasar bla diantarkan dengan uraian pengertian manajemen, Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, Yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *manager*, yang artinya menagani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk orang yang melakukan kegiatan manajemen, akhirnya, *management* diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. (Mesiono, 2017: 5).

Secara istilah manajemen ialah proses pendayagunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. (Bafadal, 2004: 2). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* bahwa manajemen ialah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. (Hasibuan, 1995, 8).

Dalam kaitannya dengan pendidikan maka secara sederhana manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di dalam unsur pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur tersebut meliputi pendidik, peserta didik, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sebagainya.

Disebut berbasis sekolah karena memang manajemen pendidikan ini berdasarkan kepada pengelolaan yang diatur oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan. Secara rinci Sagala (2009: 87) menjelaskan Manajemen pendidikan Berbasis sekolah (MPBS) sebagai suatu bentuk pengaturam dimana kekuasaan pengambilan keputusan sekolah bergeser dari pemerintah pusat bukan ke pemerintah daerah, tetapi kesekolah sendiri sebagai tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar.

Implementasi MPBS bukan untuk MPBS itu sendiri, melainkan merupakan sarana untuk melakukan perubahan dan sekolah berani untuk berubah walaupun sekolah akan berhadapan dengan birokrasi yang cenderung tidak mau berubah. Implementasi MPBS yang difokuskan pada prinsip partisipasi, transparansi, kreativitas, inovasi dan akuntabilitas akan melahirkan sekolah yang semakin fleksibel, dalam wujud sekolah akan makin mudah memberikan tanggapan terhadap gejala-gejala dan prob-

lem sekolah maupun keefektifan belajar mengajar yang muncul, muncullah penataan sekolah melalui konsep MPBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang meredesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah dengan pemberdayaan sekolah meningkatkan kualitas pendidikan nasional. (Sagala, 2004: 35)

MPBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistis. MPBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Sekolah dalam hal ini menjadi lembaga mandiri dalam menetapkan kebijakannya, tetapi memiliki jaringan kerja dengan berbagai pihak yang dapat meningkatkan mutu kinerja manajemennya. (Siahaan, dkk, 2006: 31).

Menurut Sagala (2009: 88) pada prinsipnya model manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah reformasi manajemen sekolah dilakukan untuk memperoleh kewajiban (*responsibility*), wewenang (*authority*), profesionalisme, dan tanggung jawab (*accountability*) yang tinggi juga transparansi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Reformasi manajemen sekolah dapat mengenal perubahan dan memiliki kekuasaan dan mengoptimalkan sumber daya sekolah untuk memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain peserta didik, orang tua peserta didik, guru, masyarakat, pemerintah, lapangan kerja, dan sebagainya. sejalan dengan prinsip tersebut, sekolah memiliki kewenangan untuk menetapkan sumber pelajaran, fasilitas dan alat pelajaran yang diperlukan seperti buku sumber atau textbook mata pelajaran yang akan di pakai. realisasi gagasan penerapan model MPBS akan melahirkan sikap kepemilikan (*ownership*) pada *stakeholders* terhadap sekolah, sikap kepemilikan.

#### **KARAKTERISTIK MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH**

Setiap sekolah tentu akan memiliki ciri khas atau karakteristiknya sendiri, dalam konteks manajemen pendidikan pendidikan di Indonesia sebelum kebijakan desentra-

lisasi pemerintahan, beberapa sekolah di Indonesia (dengan jumlah yang sedikit) sudah melaksanakan model manajemen berbasis sekolah (MPBS). Sekolah-sekolah dengan jumlah yang sedikit ini, disebut sebagai pelopor. Dalam perkembangannya walaupun secara kuantitatif jumlah sekolah yang menerapkan MPBS amat sedikit sebenarnya sekolah tersebut cukup hebat. Kepala sekolah yang menerapkan MBS tersebut juga termasuk berani kalau kita melihat keadaan lingkungan dan paradigma sistem manajemen pendidikan saat itu yang menerapkan paradigma birokratik. Berdasarkan pengalaman jumlah sekolah di Indonesia ternyata, proses MPBS ini termasuk baru di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa penerapan MPBS merupakan langkah koreksi pemerintah terhadap kelemahan sistem penyelenggaraan pendidikan sentralistik. Pengalaman penertapan Model MPBS di Amerika Serikat menurut Edward E. Lawler (1994) ternyata fapat meningkatkan kualitas belajar-mengajar, disebabkan adanya mekanisme yang lebih efektif dan lebih cepat dalam pengambilan keputusan, memberikan dorongan semangat kinerja baru sebafei motivasi berprestasi para kepala sekolah dalam melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah. Di negara-negara maju selain Amerika seperti Inggris, Selandia baru, dan sebagainya penerapan model MPBS ini bukanlah hal yang baru dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Sagala (2009: 93) Karakteristik MPBS dari segi penyelenggaraanya, dilaksanakan dalam beberapa model, yaitu model (1) peningkatan peranan guru ; (2) Peningkatan wawasan pengelolaan pengajaran melalui studi penelitian dan kajian pustaka; dan (3) penyamaan visi dari semua pihak dalam proses perubahan untuk memfokuskan arah baru merealisasikan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan sistem MPBS. Penerapan MPBS-nya pun dapat dilakukan pada tiga tingkatan yaitu penuh (tinggi), tingkat menengah (sedang), dan minimal (rendah). Model MPBS menurut Eric Digest (1995) mengemban dua dimensi pemahaman (1) *the gover-*

*nance reform in school management* yaitu menyangkut reformas manajemen sekolah, yang menyangkut pentingnya membangun otonomi sekolah untuk merespon aspirasi stakeholder-nya; dan (2) *an overall push for curriculum and instructional reform* yaitu menyangkut reformasi pengembangan kurikulum dan pengajaran, yaitu pengembangan inovasi dalam proses belajar mengajar.

Ciri lain dari MPBS ini adalah perubahan sistem penyelenggaraan persekolahan yang berubah dari sistem yang bersifat birokratis dan hirarkis menjadi demokratis. Dikatakan berifat demokratis karena keputusan yang berkaitan dengan manajemen persekolahan tidak hanya ditentukan oleh sekolah dan satuan atasannya saja, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pengguna jasa sekolah tersebut. Dengan kata lain dengan hadirnya MPBS ini akan memperluas peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya pendidikan. Di samping itu agar masyarakat memiliki akses yang luas terhadap berbagai kebijakan sekolah, sehingga berbagai gagasan masyarakat yang dapat menumbuhkembangkan sistem manajemen persekolahan dapat ditampung sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat pengguna jasa pendidikan. (Siahaan, dkk. 2006: 70).

## **STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH**

Ada beberapa strategi yang bisa diimplementasikan untuk manajemen pendidikan berbasis sekolah di antaranya: (1) pemberian otonomi sekolah; (2) meningkatkan partisipasi aktif masyarakat; (3) Proses pengambilan keputusan yang demokratis; (4) Kepemilikan transparansi, dan akuntabilitas; (4) Target Pencapaian Kinerja Sekolah. Untuk penjelasan rinci dapat diperhatikan di bawah ini:

### **1. Pemberian Otonomi Sekolah**

Siahaan, dkk (2006: 123-124) menjelaskan bahwa penyelenggaraan sekolah dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah bertujuan untuk memberikan

otonomi yang luas kepada sekolah. Dengan otonomi itu, setiap sekolah diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan sekolah sehingga meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya. Kinerja itu mencakup kinerja guru, siswa, orang tua siswa maupun masyarakat. Manajemen pendidikan berbasis sekolah memberikan kesempatan kepada sekolah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Pada tataran implementasinya pengelolaan sekolah dengan prinsip profesionalisme dan otonomi pengelolaan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan berbasis sekolah dan merespon inovasi. Hal ini penting mengiringi pada berfikir analisis kritis dan budaya mutu kontekstual. Sekolah yang berdaya akan mampu memberikan respon kontekstual seadanya dengan orientasi pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dan para pengguna lulusan pendidikan. Artinya perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan di sekolah selalu memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu. Dengan demikian pemberdayaan, otonomi, dan kemandirian dalam manajemen sekolah bagian dari gerakan jaminan mutu dan akuntabilitas untuk menumbuhkembangkan budaya peduli mutu.

Sagala menjelaskan agar MPBS dapat terlaksana dengan baik maka dalam hal otonomi sekolah, perlu dilakukan hal-hal seperti redesign organisasi pendidikan, dan proses perubahan sebagai proses belajar. Dalam hal ini maksudnya adalah kemandirian sekolah dalam meredesain atau memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah untuk pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemberdayaan memiliki potensi yang esensial dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan yang lebih profesional. Manajemen sekolah menyesuaikan diri terhadap deregulasi aturan, transparansi, dan akuntabilitas sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku pimpinan jajaran birokrasi pendidikan di pemerintahan, sekolah maupun masyarakat. (Sagala, 2009: 98)

## **2. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat**

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini ialah bisa dalam berbentuk perseorangan, kelompok, organisasi, komite, perusahaan, yayasan dan sebagainya. Kemitraan antara sekolah dan masyarakat akan dapat dilakukan jika (1) adanya pemahaman dan persepsi yang sama antara pemerintah kabupaten/kota dinas pendidikan, dan sekolah tentang pola-pola kemitraan dengan pihak yang berkepentingan; (2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat khususnya pengusaha secara kelembagaan maupun individu melakukan kemitraan dengan institusi pendidikan; (3) terbukanya kesempatan bagi swasta dan masyarakat sekolah; (4) Pemberdayaan potensi satuan pendidikan dan potensi masyarakat melakukan kemitraan; dan (5) peraturan/kebijakan yang mendorong terciptanya kemitraan pemerintah-swasta dan masyarakat dengan sekolah, Dari beberapa alternatif pemecahan masalah, suatu pendekatan kemitraan dengan pihak ketiga merupakan sebuah alternatif yang dapat direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah. (Sagala, 2009: 99)

Menurut Siahaan (2009: 128-129) ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan masyarakat baik secara aktif maupun proaktif dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan:

- Menghimpun masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui komite sekolah
- Memilih dan menentukan anggota komite sekolah yang memiliki pandangan yang luas tentang pendidikan
- Menjadikan komite sekolah sebagai tempat masyarakat berhimpun, memberikan masukan dan bantuan baik yang bersifat material atau apa saja yang memungkinkan semakin efektifnya manajemen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- Setiap keputusan yang diambil manajemen sekolah dalam konteks pelibatan masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus komite sekolah

- Memberikan kesempatan kepada komite sekolah untuk mencari dana, mitra dan berbagai kepentingan sekolah.

Adapun manfaat dari peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah (1) meningkatkan reputasi (*image*) sebagai organisasi yang baik; (2) meningkatkan *visibility* organisasi di lingkungan sekitar; (3) saling melengkapi dan menutupi kekurangan dan keterbatasan; (4) meningkatkan motivasi karyawan; (5) terdapat kontrol eksternal dari masyarakat.

### **3. Proses Pengambilan Keputusan Yang Demokratis**

Karena manajemen ini sifatnya desentralisasi, maka pengambilan keputusan yang sifatnya individual sangatlah bertolak belakang dengan cita-cita MPBS. Sifat desentralisasi menghendaki asas musyawarah, dan pertimbangan dari berbagai pihak saat pengambilan keputusan. Jika pada sentralisasi segala keputusan datangnya dari pusat, dan sekolah hanya tinggal meng-*amini* saja, maka tentulah tidak sejalan dengan cita-cita bangsa yang menginginkan asas demokratis dalam praktik kehidupan berbangsa.

Demokrasi bukan sekedar terletak pada ada atau tidaknya aturan menyangkut tentang sistem, prosedur, atau struktur dalam suatu pemerintahan secara baku saja. Tetap juga harus mencakup pengakuan nilai dan fungsi manusia. demokrasi memberi harapan setiap potensi individu memperoleh layanan yang memadai, Sehingga peserta didik tidak sekedar bertambah besar secara fisik, tetapi lebih dari itu. Mereka mampu mengamati dan mengembangkan pribadinya dengan penuh inovasi, kreativitas, kritis, dan produktif. Sistem pendidikan yang demokratis akan dapat lebih memberikan perhatian dan partisipasi yang besar kepada setiap elemen dalam memajukan bidang pendidikan. Oleh karena itu kepala sekolah yang efektif dan profesional adalah yang mampu mengembangkan sikap demokratik sebagai pemimpin. (Sagala, 2009: 107).

### **4. Kepemilikan Transparansi, dan Akuntabilitas**

Transparansi dapat diartikan sebagai upaya sekolah yang menganut keterbukaan

dalam manajemen organisasinya. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam merealisasi programnya dan rogram itu dapat dipertanggungjawabkan kepada ublik yang memanfaatkan seluruh jasa-jasanya.

Bentuk transparansi yang dilakukan manajemen sekolah adalah sikap sekolah yang terbuka dalam melaporkan program sekolah dan sistem penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara objektif. Manajemen pendidikan berbasis sekolah mensyaratkan agar setiap sekolah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip ini menjadi kelengkapan sekolah yang menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Sekolah-sekolah didorong untuk menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya.

walaupun pada dasarnya MPBS sifatnya desentralisasi dan dikelola penuh oleh pihak sekolah namun bukan berarti menghilangkan bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah. tetapi penataan ulang fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab dari seluruh stakeholders sekolah seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, warga sekolah lainnya, orang tua, masyarakat termasuk bisnis, dan pemerintah. melainkan bergerak ke arah penyeimbangan kembali struktur kekuasaan, oenciptaan birokrasi yang kecil dan efektif. Transfer pengambilan keputusan dan sumbernyadaya dari kontrol pemerintah ke institusi sekolah diarahkan pada akuntabilitas, sekolah harus pula tetap bergerak pada koridor kebijakan umum pemerintah pusat berkaitan dengan standar nasional pendidikan.

### **5. Target Pencapaian Kinerja Sekolah**

Kinerja memiliki posisi penting dalam manajemen dan organisasi, karena keberhasilan dalam melakukan pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja (Stephen P. Robins, 1994: 231). Hal ini berarti jika seseorang bekerja dalam organisasi atau dalam hal ini sekolah, maka kinerjanya merupakan serangkaian perilaku dan kegiatan secara individu sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi. Kinerja merupakan suatu fungsi dari moti-

vasi dan kemampuan. (Syafaruddin dan Anzizhan, 2017: 160)

Menurut Imam Wahyudi sebagaimana terdapat dalam Syafaruddin dan Anzizhan, (2017: 160) ada tiga jenis kriteria kinerja, yaitu:

- Kriteria berdasarkan sifat, yaitu memusatkan diri pada karakteristik pribadi seseorang karyawan seperti loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin
- kriteria berdasarkan perilaku, yaitu berfokus pada bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan;
- kriteria berdasarkan hasil, yaitu berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan

Pada dasarnya setiap sekolah berkeinginan untuk meningkatkan kinerja pendidik dan karyawannya. mengenai pendidik dan karywan di sebuah lembaga pendidikan, tentu yang paling mengetahui kinerja mereka adalah orang terdekat, yakni kepala sekolah. Oleh karena itu jika pendidikan dalam penyelenggaraanya bersifat sentralisasi, maka kepala sekolah tak mampu banyak berbuat disebabkan karena tak mampu mengambil banyak keputusan sebab di dahului oleh kebijakan pusat. Sedangkan jika Bersifat desentralisasi, maka kepala sekolah memiliki keleluasaan dalam membina dan meningkatkan kinerja pendidik dan karyawan yang ada di lembaga tersebut. Termasuk dalam hal ini penyusunan visi dan misi, dan rencana strategis baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

## **PELUANG DAN TANTANGAN YANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH**

Peluang dan tantangan biasanya berlangsung secara beriringan dalam manajemen organisasi. Tinggal lagi apakah hal itu dapat teridentifikasi secara utuh atau tidak, tergantung kepada manajemen organisasi melakukan analisisnya Analisis untuk mengetahui peluang dan tantangan bukanlah hal mudah untuk dilakukan, apalagi jika sumber daya manusia yang tersedia, terutama

*top leader*-nya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. untuk lebih jelas peluang dan tantangan akan dijelaskan secara terpisah, seperti yang terlihat di bawah ini:

### **1. Peluang**

Peluang yang dihadapi pada dasarnya cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari keinginan pemerintah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah dalam memenuhi kebutuhannya sebagai bagian dari diterapkannya otonomi pendidikan dan otonomi sekolah. Reformasi pendidikan mengharuskan diterapkannya otonomi pendidikan, otonomi pendidikan berarti otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk mengurus dirinya sendiri tanpa harus keluar dari koridor sistem pendidikan nasional.

Pada saat bersamaan, dengan adanya otonomi sekolah maka peluang bagi setiap kepala sekolah untuk dapat menjalankan msinya dapat terealisasi tanpa harus tergantung dan terikat secara birokratis dengan satuan atasannya, Hal ini adalah peluang yang memungkinkan setiap kepala sekolah, terutama kepala sekolah berstatus negeri untuk mengembangkan kreativitasnya secara inovatif dengan inisiatif yang tinggi.

Peluang terbesar yang diperoleh dengan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah, adalah karena masyarakat melalui komite sekolah dapat dimanfaatkan untuk mencari pemecahan masalah. Walaupun disadari bahwa pengurus komite sekolah belumlah secara utuh dan mendalam memahami apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Namun, Komite Sekolah dapat dimanfaatkan untuk menyetujui dan memberikan rekomendasi terhadap perencanaan sekolah, sekaligus memudahkan sekolah untuk merealisirnya.

### **2. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah, pada dasarnya bersifat beragam namun terkait erat dengan isu aktual mengenai pendidikan saat ini. Isu aktual yang berkaitan dalam konteks pendidikan, menjadi isu yang telah mempengaruhi opini masyarakat tentang pendidikan. Isu-isu itu

umpamanya antara lain tentang desentralisasi pendidikan, otonomi sekolah dan otonomi kepala sekolah.

Terkait dengan otonomi pendidikan yang menjadi tantangan dalam penerapan Manajemen Pendidikan berbasis Sekolah. Dunia pendidikan pada saat ini telah memanfaatkan kebijakan desentralisasi pendidikan, sebagai upaya untuk mendorong terciptanya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Pengelola dan penanggung jawab pendidikan menjadi tertantang untuk meningkatkan kinerjanya dengan menjadikan desentralisasi pendidikan sebagai modal dasar dalam mengoprasionalkan manajemen persekolahan

Kemudian terkait dengan diberlakukannya otonomi sekolah, sebagai karakteristik utama dalam MPBS, hal ini juga menjadi tantangan sebab dengan diberlakukannya otonomi sekolah, telah merubah dinamika sekoalh secara menyeluruh. Personil sekolah telah terlibat secara aktif bahkan proaktif dalam menentukan berbagai kebijakan untuk kepentingan sekolah. Apalagi dengan terlibatnya masyarakat yang memiliki akses ke sekolah, seperti adanya komite sekolah yang secara langsung terlibat

dalam berbagai kebijakan sekolah, walaupun keterlibatan itu masih bersifat proporsional.

## **PENUTUP**

Banyak fenomena yang menunjukkan bahwa manajemen sentralistik memiliki kegagalan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bahkan hal ini terjadi di Negara manapun. Itulah yang disadar oleh bangsa ini, sehingga bergulirlah isu tentang perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dan pola penerapannya di lembaga pendidikan dikenal dengan istilah Manajemen pendidikan berbasis sekolah.

Secara konsep memang model manajemen ini sangatlah di unggulkan, namun tentu saja keberhasilan itu tidaklah diukur secara satu komponen saja, melainkan secara sistem. Keunggulan konsep, tentunya harus sebanding dengan keunggulan dalam implementasi. Dalam hal implementasi tentunya MPBS harus sesuai dengan yang dicita-citakan secara teori, diantaranya peningkatan kualitas, pemerataan, transparansi dan akuntabilitas, serta yang tak kalah pentingnya adalah percepatan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hasibuan, Melayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mesiono, *Manajemen Pendidikan Raudhatul Athfal (RA)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Robbins, Stephen P., *Management: Concepts and Practice*, New Jersey: Prentice Hall, 1984.
- Sagala, Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Siahaan, Amiruddin, dkk, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Ciputat: Quantum Teaching, 2006.
- Syafaruddin dan Anzizhan, *Psikologi Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.